

**PENGARUH OPINI DAN TEMUAN AUDIT BPK RI TERHADAP  
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA PADA TAHUN 2016**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh :

**BASKORO GIVARI BANYUBIRU**

**NIM : 11-15-28549**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI  
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA  
YOGYAKARTA**

**2019**

**SKRIPSI**  
**PENGARUH OPINI DAN TEMUAN AUDIT BPK RI TERHADAP**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**  
**KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA PADA TAHUN 2016**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

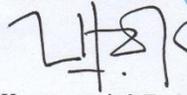
**BASKORO GIVARI BANYUBIRU**

No Induk Mahasiswa: 1115 28549

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 02 September 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) di Bidang Akuntansi.

**Susunan Tim Penguji:**

Pembimbing



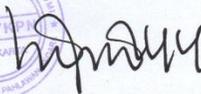
Lita Kusumasari, S.E., MSA., Ak.

Penguji



Theresia Prisanti, Dr., MBA., Ak.

Yogyakarta, 02 September 2019  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta  
Ketua



Haryono Subiyakto, Dr., M.Si.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## PENGARUH OPINI DAN TEMUAN AUDIT BPK RI TERHADAP KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA PADA TAHUN 2016

### Abstrak

Penelitian ini menguji pengaruh antara opini dan temuan audit BPK terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Indonesia pada tahun 2016. Informasi opini dan temuan audit diperoleh dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK. Kinerja Pemda Kab/Kota diperoleh melalui hasil pemeringkatan yang telah disahkan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD). Pengujian ini menggunakan metode uji regresi berganda dengan 432 sampel Kab/Kota pada tahun 2016, Hasil atas uji tersebut menunjukkan bahwa Opini audit berpengaruh signifikan dan positif terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemda yang diberikan atas pemeringkatan dari Kemendagri serta pada temuan audit berpengaruh signifikan dan negatif terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemda. Pada variabel kontrolnya yaitu Tingkat Kemandirian Pemda berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemda. Pada Tingkat Ketergantungan Pemda terhadap Pemerintah tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemda.

#### Kata Kunci:

Opini audit, Temuan audit, Tingkat Kemandiran Pemda, Tingkat Ketergantungan Pemda terhadap Pemerintah, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## PENGARUH OPINI DAN TEMUAN AUDIT BPK RI TERHADAP KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA PADA TAHUN 2016

### *Abstract*

*This research examined the effects of opinion and audit findings of BPK to the performance score of district or city government in Indonesia in 2016. Information of opinion and audit findings obtained from the Overview of The Semester Examination Result (IHPS). While for performance of district or city government obtained from ranking result that have been approved by Ministry of Home Affairs in Local Government Performance Evaluation (EKPPD). This testing use multiple regression test method with 432 samples district or city in 2016, the result of that test show that audit opinion have positive and significant effect on Local Government Performance score which given on ranking from Ministry of Home Affairs and on audit findings have negative and significant effect on Local Government Performance score. The control variable is level of independence local government that has positive effect on Local Government Performance. While on level of dependency local government have not effect to Local Government performance.*

### *Keywords:*

*Audit Opinion, Audit findings, Level of independence local government, Level of dependency local government to Government, Local Government Performance Evaluation (EKPPD).*

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan masyarakat salah satunya dapat diukur melalui Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota setempat yang melakukan kebijakan-kebijakan serta pelayanan terhadap masyarakat. Desentralisasi artinya setiap pemerintah daerah memiliki kewenangan atau kebijakan tersendiri dalam mengurus dan atau mengatur urusan keuangan secara mandiri sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa, “Bupati/Walikota menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kab/kota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang dilakukan satu kali dalam setahun”. Pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) terdapat penilaian tentang sistem tata kelola dalam pemerintahan berdasarkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan untuk melayani masyarakat. LPPD memiliki beberapa aspek yaitu urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) adalah informasi atau sumber utama terkait Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD).

Kinerja Pemerintah Daerah memiliki beberapa karakteristik termasuk diantaranya tingkat kemandirian pemerintah daerah dan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Tingkat kemandirian Pemda dapat dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD memiliki beberapa komponen yaitu Pajak daerah, Retribusi daerah, pengelolaan akan kekayaan daerah yang telah dipisahkan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Tingkat ketergantungan Pemda terhadap pemerintah dapat dilihat dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang terdapat pada komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). DAU digunakan untuk mengalokasikan dana kepada setiap Pemda sesuai dengan kondisi masing-masing daerah dan sebagai pemerataan kemampuan keuangan serta untuk menutup dalam pembiayaan pembelanjaan masing-masing daerah.

Laporan keuangan Pemda akan diperiksa oleh lembaga yang berwenang yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). UU No. 15 tahun 2006 Pasal 1 ayat 10 menyatakan bahwa, “Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara untuk dan atas nama BPK”. BPK sudah ditunjuk sebagai lembaga independen, objektif,

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

profesional untuk menilai kecermatan, kebenaran, keandalan, dan kredibilitas informasi keuangan Negara dengan proses berdasarkan standar pemeriksaan.

Opini audit dibagi menjadi empat kriteria yaitu: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), dan Tidak Wajar (TW). Opini Audit tersebut akan mencerminkan tingkat kewajaran laporan keuangan, yang akan digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menentukan kebijakan sebagai penilaian seberapa baik kinerja yang telah diperiksa. Temuan Audit meliputi 2 kelemahan yaitu Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan. Temuan-temuan audit atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dinilai dari segi potensi kerugian Negara, kerugian Negara, kelemahan administrasi, kekurangan penerimaan, ketidakefektifan dan ketidakhematan.

## **Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh Temuan audit BPK RI terhadap skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab/Kota tahun anggaran 2016 ?
2. Apakah terdapat pengaruh Opini audit BPK RI terhadap skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab/Kota tahun anggaran 2016 ?

## **Tujuan Penelitian**

Atas dasar Rumusan Masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti:

1. Adanya pengaruh antara Temuan Audit BPK RI dengan skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab/Kota tahun anggaran 2016.
2. Adanya pengaruh antara Opini Audit BPK RI dengan skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab/Kota tahun anggaran 2016.

## **Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat dikaji dari penelitian ini:

1. Bagi BPK, mendapatkan informasi terkait hasil dari opini dan temuan audit yang telah mereka keluarkan untuk menunjang kinerja masing-masing pemerintah daerah.
2. Bagi Masyarakat, informasi yang dapat diambil dari penelitian ini bahwa masyarakat setidaknya dapat menilai beberapa kinerja pemerintah daerah mereka dari karakteristik Pemda atas kebijakan yang telah diambil.

## **Kontribusi Penelitian**

Kontribusi pada penelitian ini:

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1. Bagi Akademisi: Dapat dijadikan tinjauan referensi untuk penelitian selanjutnya dalam hal mengenai Kinerja Pemerintah Daerah yang dapat dilihat dari karakteristik masing-masing Pemda.
2. Bagi Pemerintah Pusat: opini dan temuan audit BPK RI dapat menjadikan informasi untuk peningkatan kinerja pemerintah pusat, atau dapat dijadikan bahan evaluasi untuk mengambil kebijakan tertentu.
3. Bagi Pemerintah Daerah: sama halnya dengan pemerintah pusat maka penelitian ini diharapkan dapat memaksimalkan kinerja pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan yang lebih baik.

## BAB II

### TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

#### Tinjauan Teori

##### a) Otonomi Daerah

UU No. 23 tahun 2014 tentang peraturan pemerintah daerah pada Pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa, "Otonomi Daerah adalah wewenang, hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)".

##### b) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Laporan LPPD disusun oleh setiap kepala daerah berdasarkan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah setiap kurun waktu satu tahun periode dan diserahkan kepada pemerintah tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Laporan tersebut diserahkan kepada Gubernur untuk dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Laporan LPPD merupakan sumber utama informasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.. Laporan LPPD memiliki beberapa unsur yaitu penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan.

##### c) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Laporan keuangan Pemerintah daerah adalah dasar pertanggungjawaban masing-masing pemerintah daerah yang telah mendapat alokasi serta sumberdaya ekonomi dengan jangka waktu 1 periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi secara relevan mengenai posisi keuangan dan informasi mengenai suatu entitas pelaporan atas seluruh transaksinya yang telah dilakukan sesuai pada Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Komponen-komponen laporan keuangan berupa informasi mengenai catatan atas laporan keuangan, arus kas, Neraca, perubahan ekuitas, perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan realisasi anggaran serta perubahan ekuitas yang memiliki manfaat bagi para pengguna dan untuk evaluasi atas keputusan alokasi sumber daya.

## d) **Kinerja Pemerintah Daerah**

PP No. 58 tahun 2005 menjelaskan kinerja adalah, “Keluaran atau hasil dari kegiatan dan program yang telah atau yang akan dicapai dengan penggunaan anggaran berdasarkan kuantitas dan kualitas yang terukur”.

Pentingnya pengukuran kinerja untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah atau dikatakan sebagai pusat pertanggungjawaban yang nantinya berperan dalam menciptakan indikator kinerja sebagai dasar menilai kinerja. Pengukuran kinerja diukur melalui indeks komposit kinerja yang merupakan penjumlahan Indeks Capaian Kinerja dengan pengukuran Indikator Kinerja Kunci (IKK). Informasi yang diperoleh dari sistem pengukuran kinerja dengan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, aspek penyelenggaraan pemerintah yang baru dibentuk serta penyelenggaraan otonomi baru akan dikumpulkan dan dianalisis datanya secara sistematis. Proses tersebut dinamakan dengan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD).

Pemda memiliki beberapa karakteristik yang dapat menjadi penilaian atas kinerja untuk pelaksanaan Otonomi Daerah. Tingkat Kemandirian Pemda yang dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Aspek-aspek yang menjadi dasar PAD yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, pengelolaan akan kekayaan daerah yang telah dipisahkan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Karakteristik kinerja Pemda juga dapat diukur dalam hal tingkat ketergantungan pemda terhadap pemerintah pusat yang dilihat dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk mengalokasikan Dana kepada setiap Pemda sesuai dengan kondisi masing masing daerah dan sebagai pemerataan kemampuan keuangan yang menjadi komponen pada APBN dan APBD setiap tahunnya.

## e) **Badan Pemeriksa Keuangan**

Kewajiban setiap daerah harus menyerahkan laporan keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Sebelum diserahkan hasilnya, Laporan pertanggungjawaban terlebih dahulu harus diperiksa oleh lembaga independen yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pada UU RI Pasal 6 No.15 tahun 2006 di BAB III pada ayat 3 menyatakan bahwa pemeriksaan BPK memiliki 3 jenis pemeriksaan yaitu:

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- a. Pemeriksaan Keuangan
- b. Pemeriksaan Kinerja
- c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu

## f) Opini Audit

Pada UU RI No.15 tahun 2014 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara menjelaskan bahwa, “Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan”. Opini Audit memiliki empat kriteria yaitu:

- a. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) / *Unqualified Opinion*
- b. Wajar Dengan Pengecualian (WDP) / *Qualified Opinion*
- c. Tidak Memberikan Pendapat (TMP) / *Disclaimer Opinion*
- d. Tidak Wajar (TW) / *Adverse Opinion*

## g) Temuan Audit

Terdapat 2 kriteria dalam temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan yaitu:

- a) Sistem Pengendalian Internal memiliki beberapa aspek kelemahan dalam temuannya yaitu: Kelemahan Sistem pengendalian Akuntansi dan pelaporan, Kelemahan struktur pengendalian internal, Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja.
- b) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan  
Ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan memiliki beberapa aspek dalam temuannya yaitu: Temuan pada kekurangan penerimaan, Temuan pada Administrasi, indikator kerugian Negara atau temuan pada kerugian Negara, Temuan pada Efektivitas serta Temuan pada Efisiensi dan Kehematan.

## Pengembangan Hipotesis

### 1) Temuan Audit BPK RI

BPK melakukan pemeriksaan terhadap LKPD yang menghasilkan suatu temuan audit yang didasarkan pada aspek Sistem Pengendalian Intenal dan Kepatuhan terhadap perundang-undangan. Penelitian ini berfokus pada aspek Ketidakpatuhan terhadap peraturan undang-undang yang berlaku. Semakin besar temuan audit BPK maka memiliki penilaian semakin buruknya kinerja suatu pemda tersebut. Penilaian Temuan audit terhadap kinerja pemda telah diuji oleh Sudarsana (2013), penelitiannya dalam ruang lingkup Kab/Kota tahun 2010 menyimpulkan, “Temuan audit BPK memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pemda kab/kota”. Konsep tersebut dapat dikaji secara teoritis oleh peneliti dalam ruang lingkup Kab/Kota dengan hipotesis:

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

*H<sub>1</sub>: Adanya pengaruh signifikan negatif antara Temuan Audit BPK RI dengan tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab/Kota tahun anggaran 2016.*

## 2) Opini Audit BPK RI

BPK memiliki empat aspek mendasar dalam pengujian terhadap LKPD yang nantinya akan diberikan hasil salah satunya berupa Opini Audit dan dituangkan pada Laporan IHPS, yaitu dari segi Standar Akuntansi yang telah ditetapkan, Kepatuhan terhadap perundang-undangan, Efektivitas Pengendalian Intenal, serta Kecukupan Pengungkapan. Hasil opini audit berupa WTP dan WDP memberikan penilaian serta informasi yang baik bahwa Laporan keuangan terbebas dari salah saji material. Hasil tersebut membuktikan ukuran kinerja Pemda yang dilihat dari Opini audit dengan penilaian WTP dan WDP. Penilaian Opini audit terhadap kinerja pemda telah diuji oleh Budianto (2012), penelitiannya dalam ruang lingkup Pemda Kab/Kota tahun 2008-2010 menyimpulkan bahwa, “Opini Audit BPK berupa WTP dan WDP berpengaruh terhadap skor kinerja Pemda serta memiliki penilaian lebih baik pada skor kinerja Pemda, dibandingkan dengan Pemerintah daerah yang mendapatkan Opini audit berupa TW dan TMP”. Konsep tersebut dapat dikaji secara teoritis dengan hipotesis:

*H<sub>2</sub>: Adanya pengaruh signifikan positif antara Opini Audit BPK RI dengan tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab/Kota tahun anggaran 2016.*

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### Ruang Lingkup Penelitian

Kementerian Dalam Negeri menilai kinerja pemerintah berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang menghasilkan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) dalam bentuk skor. Penilaian kinerja tidak hanya berasal dari LPPD namun informasi lain yang dapat digunakan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pemeriksaan atas laporan-laporan tersebut akan diperiksa oleh BPK sebagai suatu lembaga Independen yang berwenang. Hasil atas pemeriksaan yang akan dikemukakan oleh BPK berupa Opini dan Temuan Audit.

#### Sampel dan Data Penelitian

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Penelitian ini menggunakan data sekunder, data tersebut terdiri dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 dan 2 pada tahun anggaran 2017 dan dari Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2016 yang telah disahkan oleh Kemendagri, dalam penilaiannya menggunakan *score* pada masing-masing Pemda Kab/Kota serta hasil dari LKPD mengenai karakteristiknya berupa data Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum. Pengambilan sampel data penelitian pada tabel sebagai berikut:

## Pengambilan Sampel Data

Proses Pengambilan Sampel Tahun 2016	Jumlah
Jumlah Pemda Kab/Kota di Indonesia	508
Pemda tidak menyampaikan LPPD	(18)
Data Pemda Kab/Kota yang tidak lengkap	(25)
Data Outlier	(33)
Jumlah Sampel Akhir yang dapat digunakan	432

## Jenis dan Definisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2007), variabel dependen merupakan variabel yang akan dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel independen ialah variabel yang timbul untuk mempengaruhi variabel dependen. Variabel kontrol merupakan variabel yang dikendalikan sehingga hubungan antara variabel independen dengan dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti pada penelitian. Penelitian ini memiliki tiga variabel utama yaitu:

### Variabel Dependen

1. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab/Kota (Y): Variabel dependen adalah kinerja penyelenggaraan pemda kab/kota. Menggunakan data dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai sumber informasi dari EKPPD tahun 2016 yang telah disahkan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan *Score* range 0-4.

### Variabel Independen

1. Temuan Audit BPK RI ( $X_1$ ): Peneliti menggunakan data atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.  
Temuan Audit (dalam rupiah) / Total Realisasi Belanja
2. Opini Audit BPK RI ( $X_2$ ): Diperoleh dari IHPS 1 dan 2 tahun 2017 dan dengan menggunakan variabel *dummy* yaitu angka 1 untuk Opini WTP dan WDP serta angka 0 untuk Opini TMP dan TW.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## Variabel Kontrol

3. Tingkat Kemandirian Pemda Kab/Kota ( $X_3$ ): Pendapatan Asli Daerah digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. Tingkat kemandirian pemda dapat dirumuskan dengan:

Pendapatan Asli Daerah / Total Pendapatan

4. Tingkat Ketergantungan Pemda Kab/Kota terhadap Pemerintah Pusat ( $X_4$ ). Dana Alokasi Umum sebagai acuan penelitian ini. DAU dapat dirumuskan:

Dana Alokasi Umum / Total Pendapatan

## Kerangka Pikiran :

Variabel Independen

**Temuan Audit  
(H1)**

**Opini Audit  
(H2)**

Variabel Kontrol

**Kemandirian  
Pemerintah  
Daerah**

**Tingkat  
Ketergantungan  
terhadap  
Pemerintah**

**KINERJA  
PEMERINTAH  
DAERAH (Kab/Kota)  
tahun 2016**

## Model Penelitian

Analisis regresi berganda sering disebut juga *multiple linear regression* tujuannya untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan dependen apakah dari beberapa variabel independen tersebut berhubungan positif atau negatif, maka dapat dituliskan persamaan regresi dengan:

$$SCORE_{it} : \beta_0 + \beta_1 TEMUAN_i + \beta_2 OPINI_i + \beta_3 PAD_i + \beta_4 DAU_i + \varepsilon$$

## BAB IV

### ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## Analisis Data

Statistika deskriptif diperoleh dari 432 sampel Pemda Kab/Kota di Indonesia pada tahun 2016.

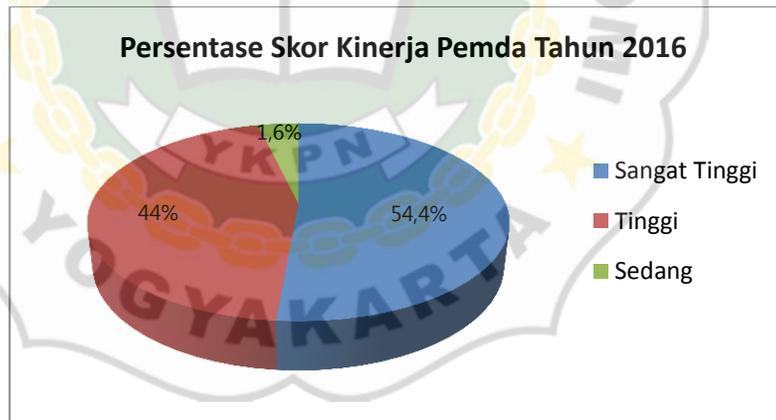
**Statistik Deskriptif Variabel Penelitian**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.Deviation
SKOR	432	1.892200	3.592600	3.009440	0.280563
TEMUAN	432	0.000014	0.064088	0.002439	0.004611
OPINI	432	0.000000	1.000000	0.970000	0.183000
PAD	432	0.006416	0.550183	0.094382	0.075981
DAU	432	0.000000	0.777386	0.497380	0.103957

Sumber olah data SPSS

## Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Skor kinerja penyelenggaraan pemda dapat dilihat melalui tabel diatas dengan hasil rata-rata sebesar 3,00944. Berdasarkan hasil rata-rata tersebut maka skor kinerja pemda kab/kota sudah dapat dikatakan baik dengan kriteria prestasi sangat tinggi.



Pada tahun 2016 pemda kab/kota memperoleh kriteria Sangat Tinggi sebesar 54,4%, sedangkan kriteria Tinggi sebesar 44% dan yang Sedang sebesar 1,6%. Pada tahun 2016 peringkat tertinggi diduduki oleh Kabupaten Sidoarjo dengan skor sebesar 3,5926 termasuk dalam kriteria Sangat Tinggi, sedangkan untuk peringkat terendah diduduki oleh Kabupaten Mappi dengan skor sebesar 1,8922 termasuk dalam kriteria Sedang.

## Temuan Audit

Bila dilihat dari hasil statistik deskriptif maka rata-rata temuan audit BPK sebagai variabel independen sebesar 0,0024385. Angka tersebut menunjukkan

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kecilnya temuan audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dapat dikatakan kinerja pemda kab/kota di Indonesia dalam melakukan pengelolaan keuangan pada tahun 2016 berkategori baik. Temuan audit BPK tertinggi diperoleh Kab Waropen sebesar 0,064088, dan untuk temuan audit terendah diperoleh Kab Bone sebesar 0,000014.

## **Opini Audit**

Opini audit BPK atas 432 pemda kab/kota memiliki persentase pada kriteria WTP sebesar 71%, untuk Opini WDP dengan persentase 25,5% dan sisanya dengan Opini TMP dengan persentase 3,5%. Hasil ini menunjukkan kinerja pemda kab/kota dapat dikatakan sudah baik karena opini audit TMP hanya memiliki 3,5% saja dan opini TW sebesar 0%.

## **Tingkat Kemandirian Pemda**

Tingkat Kemandirian Pemda Kab/Kota tahun 2016 memiliki rata-rata sebesar 0,094382 dengan persentase 9,4%. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih kecilnya proporsi pendapatan asli daerah dari masing-masing pemda kab/kota pada tahun 2016 jika dibandingkan dengan total pendapatan yang telah diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemda Kota Surabaya memiliki pendapatan asli daerah tertinggi sebesar 0,550183 yang berarti memiliki proporsi tingkat kemandirian pemda sebesar 55% dari total pendapatan, sedangkan pemda Kab Tolikara memiliki pendapatan asli daerah terendah sebesar 0,006416 atau dengan proporsi 0,64% dari total pendapatan.

## **Tingkat Ketergantungan Pemda terhadap Pemerintah**

Dana alokasi umum sebagai tingkat ketergantungan pemda kab/kota terhadap pusat memiliki angka rata-rata DAU sebesar 0,49738 atau dengan persentase 49,7%. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing pemda kab/kota memiliki proporsi yang cukup besar terhadap dana alokasi umum yang dibandingkan dengan total pendapatan yang diterimanya. Pemda Kota Bukit Tinggi memiliki dana alokasi umum tertinggi sebesar 0,777386 sedangkan Pemda Kab Bengkalis memiliki dana alokasi umum terendah sebesar 0,000000.

## **Teknik Pengujian Data Dengan Uji Asumsi Klasik**

### **a) Uji Normalitas**

Hasil tes disajikan:

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Res
N		432
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0.0000000
	Std. Dev	0.2229190
Most Extreme Differences	Absolute	0.043
	Positive	0.021
	Negative	- 0.043
Kolmogorov-Smirnov Z		0.891
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.406

a. Test distribution is Normal

b. Calculated from data

Tabel tersebut menunjukkan bahwa uji normalitas pada angka *asym sig (2 tailed)* sebesar 0,406. Atas dasar nilai  $\alpha$  sebesar (5%), maka persentase 40,6% lebih besar dari tingkat keyakinan yang ditetapkan. Kesimpulan dari data tersebut dapat dikatakan berdistribusi normal atau pengujian regresi yang telah dilakukan telah memenuhi asumsi normalitas.

### b) Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui adanya Multikolinieritas pada data penelitian dengan melihat angka dari *Tolerance* dan VIF atau *Variance Inflation Factor*.

### Hasil Uji Multikolinieritas dengan Nilai Tolerance dan VIF

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
TEMUAN	0.720	1.388
OPINI	0.739	1.353
PAD	0.815	1.227
DAU	0.824	1.214

Nilai Toleransi pada masing-masing variabel yaitu temuan audit sebesar 0,720, Opini audit sebesar 0,739, PAD sebesar 0,815, serta pada variabel DAU sebesar 0,824. Hasil tersebut menunjukkan bahwa data pada penelitian ini dikatakan tidak terjadi Multikolinieritas atas dasar pengambilan keputusan bahwa variabelnya lebih besar dari angka 0,1. Jika

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dilihat pada angka VIF menunjukkan hasil dari masing-masing variabel yaitu temuan audit sebesar 1,388, Opini audit sebesar 1,353, PAD sebesar 1,227, dan DAU sebesar 1,214. Hasil ini menunjukkan tidak terjadi Multikolinieritas atas dasar pengambilan keputusan bahwa angka VIF tersebut lebih kecil dibandingkan dengan angka 10.

## Hasil Uji Multikolinieritas dengan Besaran Nilai Korelasi

Model		DAU	OPINI	PAD	TEMUAN
Correlations	DAU	1.000	- 0.012	0.391	- 0.092
	OPINI	- 0.012	1.000	- 0.050	0.495
	PAD	0.391	- 0.050	1.000	0.093
	TEMUAN	- 0.092	0.495	0.093	1.000
Covariances	DAU	0.013	- 0.000	0.007	- 0.029
	OPINI	- 0.000	0.005	- 0.001	0.093
	PAD	0.007	- 0.001	0.025	0.040
	TEMUAN	- 0.029	0.093	0.040	7.598

a. Dependent Variable: SKOR

Melihat besaran nilai korelasi antar variabel independen, dapat dilihat bahwa hanya variabel temuan audit yang memiliki nilai korelasi yang cukup tinggi dengan variabel opini audit dengan tingkat korelasi sebesar 0,495 atau dengan persentase 49,5% yang berarti masih dibawah 90%. Hasil diatas menunjukkan tidak adanya multikolinieritas antar variabel independen dalam regresi.

## c) Uji Heterokedastisitas

Hasil uji heterokedastisitas dari empat variabel yaitu variabel temuan audit sebesar 0,132, opini audit sebesar 0,768, DAU sebesar 0,828, dan PAD sebesar 0,519. Hasil tersebut lebih besar dari tingkat keyakinan yang ditetapkan yaitu  $\alpha$  (5%) sehingga disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas.

## Hasil Uji Heterokedastisitas

Model	t	Nilai Sig.	Tingkat Sig.
TEMUAN	1.511	0.132	0.05
OPINI	- 0.295	0.768	0.05
PAD	0.645	0.519	0.05
DAU	0.218	0.828	0.05

a. Dependent Variable: RES2

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## Teknik Pengujian Data Dengan Uji Hipotesis

### Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	2.653	0.094		28.213	0.000
	TEMUAN	- 11.613	2.756	- 0.191	- 4.213	0.000
	OPINI	0.354	0.068	0.231	5.164	0.000
	PAD	1.423	0.157	0.385	9.046	0.000
	DAU	- 0.183	0.114	- 0.068	- 1.599	0.111

### Variabel Independen

#### 1. Temuan Audit

Hipotesis 1 dalam penelitian ini yaitu “Adanya pengaruh signifikan negatif antara Temuan Audit BPK RI dengan tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab/Kota tahun anggaran 2016”. Angka t-sig Temuan Audit sebesar 0,000. Pada pengujian t-sig dengan hasil uji angka t-sig lebih kecil dibandingkan dengan angka  $\alpha$  (5%), maka variabel temuan audit berpengaruh signifikan terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemda kab/kota. Jika dilihat dari angka koefisien sebesar -11,613 maka variabel temuan audit berpengaruh negatif terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemda kab/kota. Atas hasil tersebut berarti menyatakan bahwa hipotesis 1 diterima.

#### 2. Opini Audit

Hipotesis 2 dalam penelitian ini yaitu “Adanya pengaruh signifikan positif antara Opini Audit BPK RI dengan tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab/Kota tahun anggaran 2016. Angka t-sig Opini audit sebesar 0,000, sesuai dengan pengujian t-sig lebih kecil dibandingkan dengan angka  $\alpha$  (5%), berarti bahwa variabel opini audit berpengaruh signifikan terhadap skor kinerja pemda kab/kota. Dilihat dari angka koefisien sebesar 0,354 maka variabel opini audit berpengaruh positif terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemda kab/kota. Hasil tersebut berarti menyatakan bahwa hipotesis 2 dapat diterima.

### Variabel Kontrol

#### 3. Tingkat Kemandirian Pemda

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pada angka t-sig PAD sebesar 0,000, sesuai pada pengujian t-sig dengan hasil uji angka t-sig lebih kecil dibandingkan dengan angka  $\alpha$  (5%), menyatakan bahwa variabel PAD berpengaruh signifikan terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemda kab/kota sebagai variabel kontrol. Dilihat dari angka koefisien sebesar 1,423 maka variabel PAD berpengaruh positif terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemda kab/kota.

#### 4. Tingkat Ketergantungan Pemda terhadap Pemerintah

Pada angka t-sig DAU sebesar 0,111. Pada pengujian t-sig dengan hasil uji angka t-sig lebih besar dibandingkan dengan angka  $\alpha$  (5%), dengan hasil tersebut bahwa variabel DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemda kab/kota sebagai variabel kontrol. Jika dilihat dari angka koefisien sebesar -0,183 maka variabel DAU tidak berpengaruh negatif terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemda kab/kota.

#### Uji F

Dilihat dari angka F Hitung 62,346 yang lebih besar dibandingkan dengan angka pada F Tabel sebesar 2,41, maka pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu temuan audit dan opini audit, serta variabel kontrol berupa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu skor kinerja pemda.

#### Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	12.509	4	3.127	62.346	0.000
	Residual	21.418	427	0.050		
	Total	33.926	431			

a. Predictors: (Constant), DAU, OPINI, PAD, TEMUAN

#### Uji Determinasi ( $R^2$ )

Angka 0,363 dengan persentase 36% berarti bahwa variabel independen yaitu temuan dan opini audit, serta variabel kontrolnya pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum mampu menjelaskan variabel skor kinerja pemda sebagai variabel dependen. Sisa persentase sebesar 64% berarti bahwa terdapat variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam penelitian ini yang dapat menerangkan variabel dependen.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## Hasil Uji R<sup>2</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Est.	Durbin Watson
1	0.607	0.369	0.363	0.2239607	1.169

## Analisis Regresi Berganda

### Hasil Uji Regresi Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.653	0.094		28.213	0.000
	TEMUAN	- 11.613	2.756	- 0.191	- 4.213	0.000
	OPINI	0.354	0.068	0.231	5.164	0.000
	PAD	1.423	0.157	0.385	9.046	0.000
	DAU	- 0.183	0.114	- 0.068	- 1.599	0.111

a. Dependent Variable: SKOR

Persamaan regresi berganda:

$$Y = 2,653 - 11,613X_1 + 0,354X_2 + 1,423X_3 - 0,183X_4$$

Penjelasan terhadap persamaan regresi berganda:

- Angka terhadap konstanta sebesar 2,653, memiliki arti bahwa apabila Temuan dan Opini Audit BPK serta Tingkat Kemandirian Pemda dan Tingkat ketergantungan Pemda terhadap pemerintah sama dengan 0 maka angka skor kinerja kab/kota sebesar 2,653.
- Koefisien variabel temuan audit sebesar -11,613, memiliki arti bahwa apabila temuan audit mengalami kenaikan sebesar 1% dari total realisasi anggaran belanja pemda maka skor kinerja pemda kab/kota akan mengalami penurunan sebesar -11,613.
- Koefisien variabel opini audit sebesar 0,354, berarti bahwa pada variabel *dummy* dengan angka 1 memiliki peningkatan pada skor kinerja pemda kab/kota sebesar 0.354. Koefisien variabel tingkat kemandirian pemda sebesar 1,423, memiliki arti bahwa apabila tingkat kemandirian pemda mengalami kenaikan sebesar 1% dari total realisasi pendapatan pemda maka skor kinerja pemda kab/kota akan mengalami kenaikan sebesar 1,423, diasumsikan variabel lainnya tetap.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- d. Koefisien variabel tingkat ketergantungan pemda terhadap pemerintah sebesar  $-0,183$ , memiliki arti bahwa apabila tingkat ketergantungan pemda terhadap pemerintah mengalami kenaikan sebesar 1% dari total realisasi pendapatan pemda maka skor kinerja pemda kab/kota akan mengalami penurunan sebesar  $-0,183$ , diasumsikan variabel lainnya tetap.

## Pembahasan

### Variabel Independen

#### 1. Temuan Audit

Variabel temuan audit berpengaruh signifikan negatif terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemda kab/kota sebagai variabel independen. Kesimpulan atas hasil tersebut apabila ditemukan kecilnya temuan audit BPK maka dapat dikatakan meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemda. Begitupula sebaliknya apabila ditemukan besarnya temuan audit maka dapat dikatakan turunnya kinerja penyelenggaraan pemda. Hasil pada penelitian ini sejalan dengan pengujian yang dilakukan oleh Mustikarini & Fitriasari (2012), penelitiannya dalam ruang lingkup kab/kota tahun 2007 menyimpulkan, “temuan audit berpengaruh negatif terhadap skor kinerja pemda”.

#### 2. Opini Audit

Variabel opini audit berpengaruh signifikan positif terhadap skor kinerja pemda kab/kota sebagai variabel independen. Kesimpulan bahwa dengan meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemda dapat dikategorikan atas peningkatan opini audit BPK. Begitupula sebaliknya apabila opini audit mengalami penurunan maka dapat dikatakan turunnya kinerja masing-masing pemda. Pemda Kab/Kota yang mendapatkan Opini WTP dan WDP sudah seharusnya mendapatkan skor kinerja pemda yang baik. Jika pemda mendapatkan opini audit yang baik tetapi memiliki skor kinerja yang buruk maka pemda tersebut dapat melakukan koreksi untuk dapat memperbaiki kinerjanya pada periode yang akan datang. Penelitian ini sejalan dengan pengujian yang dilakukan oleh Kusumawardani (2015), penelitiannya dalam ruang lingkup Provinsi menyimpulkan, “Opini audit memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap skor kinerja pemda”.

### Variabel Kontrol

#### 3. Tingkat Kemandirian Pemda

Variabel PAD berpengaruh signifikan positif terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemda kab/kota sebagai variabel kontrol. Kesimpulan bahwa dengan meningkatnya skor kinerja penyelenggaraan suatu pemda

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dapat dikategorikan pada semakin tingginya tingkat kemandirian pemda tersebut. Pemda dengan tingkat PAD yang tinggi sudah seharusnya memiliki skor kinerja yang tinggi pula, karena semakin mandiri suatu pemda maka pemda tersebut memiliki tuntutan untuk semakin baik dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset atau kekayaan yang dimilikinya untuk direalisasikan kepada masyarakat. Penelitian ini sejalan dengan pengujian yang dilakukan oleh Mustikarini & Fitriasari (2012), penelitiannya dalam ruang lingkup kab/kota tahun 2007 menyimpulkan, “pengukuran PAD melalui tingkat kekayaan daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap skor kinerja pemda”.

#### 4. Tingkat Ketergantungan Pemda terhadap Pemerintah

Variabel DAU tidak berpengaruh negatif terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemda kab/kota. Kesimpulan bahwa dengan turunnya skor kinerja penyelenggaraan suatu pemda dapat dikategorikan pada semakin tingginya tingkat ketergantungan pemda terhadap pemerintah tersebut. Jika suatu pemda memiliki penerimaan DAU yang rendah bukan menjadikan alasan rendahnya skor kinerja pemda atau dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat yang tidak optimal, dikarenakan suatu pemda yang memperoleh DAU yang rendah biasanya memiliki tingkat kekayaan daerah (PAD) yang besar. Mengacu pada hasil penelitian ini, maka tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustikarini & Fitriasari (2012), penelitiannya dalam ruang lingkup kab/kota tahun 2007 menyimpulkan, “pengukuran DAU melalui tingkat ketergantungan pemda terhadap pusat berpengaruh positif terhadap skor kinerja pemda”. Namun sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Harumiati & Payamta (2014), penelitiannya dalam ruang lingkup kab/kota tahun 2011 menyimpulkan, “tingkat ketergantungan pemda terhadap pemerintah tidak berpengaruh negatif terhadap skor kinerja pemda”.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### Kesimpulan

Penelitian ini dalam menguji pengaruh antara variabel independen yaitu Opini dan Temuan Audit BPK terhadap variabel dependen yaitu skor kinerja penyelenggaraan pemda dengan tingkat ketergantungan pemda terhadap pemerintah dan tingkat kemandirian pemda sebagai variabel kontrolnya dengan hasil sebagai berikut:

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1. Variabel Independen yaitu Opini audit berpengaruh signifikan positif dan untuk variabel temuan audit berpengaruh signifikan negatif terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemda.
2. Variabel Kontrol yaitu Tingkat Kemandirian Pemda yang dilihat dari Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif sedangkan untuk variabel Tingkat Ketergantungan Pemda terhadap Pemerintah yang dilihat dari penerimaan Dana Alokasi Umum tidak memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja penyelenggaraan pemda.

## **Keterbatasan Penelitian**

Adanya keterbatasan pada penelitian ini yang dapat dikaji sebagai berikut:

1. Peneliti hanya melakukan penelitian dari segi ruang lingkup tingkat Kabupaten/Kota pada tahun 2016, dikarenakan rentang waktu yang lama pada penerbitan data skor EKPPD dari Kemendagri.
2. Variabel independen dan variabel kontrol pada penelitian hanya dapat menerangkan dan memberikan penjelasan dari sebagian kecil variabel dependennya saja. Sisa pada variabel lainnya tidak dijelaskan atau tidak dikaji dalam model penelitian ini.

## **Saran**

Adapun saran untuk penelitian selanjutnya yang dapat dikaji sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji atau melakukan penelitian menggunakan rentang waktu yang lebih luas.
2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel lainnya yang mengacu atau dapat mempengaruhi pada kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah seperti jumlah penduduk, derajat ketidakmerataan distribusi penduduk, tingkat kemakmuran atau tingkat kekayaan pemda.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan. (2017). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2017*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2017). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2017*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan.
- BPK. (2007). In *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara* (p. 47).
- Budianto, W. (2012). Pengaruh Opini, Temuan Audit dan Gender Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun 2008-2010.
- Harumiati, Y., & Payamta. (2014). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun Anggaran 2011.
- Kusumawardani , T. (2015). Pengaruh Opini dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Di Indonesia Tahun 2011-2013.
- Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik.
- Mustikarini, W. A., & Fitriasari, D. (2012). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun Anggaran 2007.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Putera, R. E. (2016). *Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan Di Kabupaten Tanah Datar Dalam Melaksanakan Desentralisasi Fiskal*.

Santoso, S. (2002). In *Buku Latihan SPSS Statistik Multivariat* (p. 41).

Sudarsana, H. S. (2013). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*.

Sugiyono. (2007). In *Statistika Untuk Penelitian* (p. 4).

Sugiyono. (2013). In *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (p. 81).

Sunyoto, D. (2012). In *Analisis Validitas & Asumsi Klasik*.

Susetyo, B. (2012). In *Statistika* (p. 169).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksaan Keuangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.